

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, pendidikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum di dalam UUD 1945 bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat 1, bahwa; Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan¹. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 3 ditegaskan bahwa: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan pada ayat 5 berbunyi: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".²

Konsep dasar pendidikan nasional yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Sisdiknas sangat kental dengan nilai pendidikan agama Islam, seperti fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

h. 3 ¹ Sekretaris Jenderal MPR-RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekjen MPR-RI),

² *Ibid.*, h. 54.

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Dalam konteks ini kedudukan pendidikan agama Islam (beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia) merupakan salah satu mata pelajaran inti dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Dan untuk melaksanakan proses pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam, banyak faktor yang saling terkait, salah satu faktor kunci untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia adalah faktor guru.

Faktor guru sangat dominan di dalam proses pendidikan dan mempunyai kedudukan khusus sesuai di dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1) bahwa:

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁴

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional menunjukkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya; (1) Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas, (2) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, dan (3) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, (Jakarta: Depdiknas, 2003) h. 3.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Depdiknas, 2005), h. 4.

kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.⁵

Secara etimologi arti profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang artinya keterangan, pernyataan, kepercayaan agama, pencaharian dan dalam bahasa Latin disebut *profecus* yang artinya: mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu.⁶ Yang mana pengakuannya itu berasal dari siswa, kolega, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat pada umumnya.

Adapun secara terminologi, profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksudkan di sini adalah ada persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis.⁷

Seorang guru yang profesional harus memiliki sifat dan sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional, meski mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang sama atau katakanlah berada pada satu ruang kerja. Tidak jarang pula orang yang berlatar belakang pendidikan yang sama dan bekerja pada tempat yang sama menampilkan kinerja yang profesional yang berbeda, serta berbeda pula pengakuan masyarakat kepada mereka.⁸

Keprofesionalan seorang guru adalah dengan cara mengembangkan

⁵ *Ibid.*, h. 4.

⁶ Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 101.

⁷ *Ibid.*, h. 103.

⁸ *Ibid.*, h. 105.

profesi keguruannya, yang bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi juga memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan dalam proses pendidikan dan lebih bertanggung jawab terhadap proses pendidikan tersebut, seperti mengabdikan dirinya pada masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, negara dan agama, sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di samping itu pula setiap guru harus dapat memahami fungsi, peran dan tanggung jawab terhadap cara bertindak dan menunaikan pekerjaannya di masyarakat.⁹

Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 28, bahwa seorang pendidik atau guru memiliki; (1) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:(a) Kompetensi pedagogik, (b) Kompetensi kepribadian (c) Kompetensi profesional (d) Kompetensi sosial.¹⁰

Pada kompetensi pedagogik meliputi; pemahaman terhadap kurikulum

⁹ Ahmad Suriansyah, *Landasan Pendidikan*, (Banjarmasin: Comdes, 2011), h. 76.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*,(Jakarta: Depdiknas, 2005), h. 14-15.

seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 dengan berbagai permasalahannya, penyusunan bahan ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS), pemahaman model-model pembelajaran dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, teknik evaluasi, permasalahan peserta didik, serta perihal kepustakaan. Kompetensi kepribadian meliputi; sehat jasmani dan rohani, bertakwa, memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual, berwibawa, ikhlas, sabar, tidak suka marah, mampu memberi motivasi dan menegur dengan bijaksana.¹¹

Kompetensi sosial adalah berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, maka harus dapat memperlakukan peserta didik secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Ia harus memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Kompetensi sosial yang dimiliki seorang guru adalah lebih banyak menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka, seperti: orang tua, tetangga dan sesama teman.¹²

Kompetensi Profesional adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh guru yaitu dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, maka oleh sebab itu peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran harus memiliki kemampuan; (a) Merencanakan sistem

¹¹ Imam Tholikhah, *Profil Ideal Guru Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Titian Pena, 2008), h. 36.

¹² Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 19.

pembelajaran seperti: merumuskan tujuan, memilih materi yang akan diajarkan, menggunakan metode, menggunakan sumber belajar yang ada, dan menggunakan media pembelajaran, (b) Melaksanakan sistem pembelajaran, seperti: memilih bentuk pembelajaran yang tepat, menyajikan urutan pembelajaran yang tepat, (c) Mengembangkan sistem pembelajaran, seperti: mengoptimalkan potensi peserta didik, meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri, mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.¹³

Dari pengertian profesi guru tersebut di atas dan penguasaan sejumlah kompetensi sebagai keterampilan dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara efektif dan efisien. Hubungan antara profesi dan kompetensi dijelaskan oleh Muhibbin Syah (1995) dengan mengatakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru yang dikaitkan dengan keprofesionalan guru adalah seorang guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi.¹⁴

Dalam rangka meningkatkan penguasaan kompetensi guru seperti tersebut di atas, terlebih bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah dengan cara; (1) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, (2)

¹³*Ibid.*, h. 20.

¹⁴Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 56

Menganalisa materi struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam.¹⁵

Di dalam Pedoman Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP-PAI) pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) ditegaskan bahwa; untuk menunjang peningkatan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) tersebut diperlukan adanya wadah (forum organisasi) yang berfungsi sebagai wahana komunikasi, informasi, diskusi, dan pembinaan sesama guru pendidikan agama Islam pada SMA/SMK perlu ditingkatkan fungsinya secara optimal.¹⁶

Keberadaan organisasi profesi guru atau forum Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) untuk jenjang Sekolah Dasar, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP-PAI) untuk jenjang SMP dan SMA/SMK ini perlu diaktualisasikan dan diberdayakan sesuai perkembangan pendidikan saat ini, di samping itu pula sebagai pembinaan dan pengembangan berbagai kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) tersebut secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.

Dengan demikian maka guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mampu berperan secara optimal dalam menampilkan nilai-nilai keIslaman yang lebih dinamis dan aplikatif. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus memiliki *skill* dan kompetensi yang handal sehingga diharapkan dapat bersaing secara positif bagi kemajuan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru*, (Jakarta: 2007), h. 23.

¹⁶ Direktur PAIS, Dirjen Pendis Departemen Agama RI, *Pedoman Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA/SMK*, (Jakarta:Depag RI, 2008), h. 2.

dan pengamalan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Musyawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah salah satu wadah atau tempat kegiatan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan untuk membina hubungan kerjasama secara baik antara sesama guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing guru. Maka melalui kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalismenya, apalagi kalau guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tersebut telah bersertifikasi, maka tanpa peningkatan kemampuan dan pengembangan tugas dan fungsi sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI), rasanya sulit menciptakan situasi yang kondusif untuk menumbuhkembangkan suasana di sekolah yang berdampak pada pencapaian kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pembinaan dan pelayanan di bidang pendidikan agama Islam merupakan tugas Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 248 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Tugas Pembinaan dan Pelayanan di Bidang Pendidikan Agama Islam merupakan penjabaran pasal 3 dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, bermutu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis dan bertanggung jawab.¹⁷

Peningkatan mutu pendidikan agama Islam pada sekolah tidak akan terwujud tanpa adanya peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, tersedianya sarana prasarana ibadah yang memadai, intensitas supervisi akademik, dan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai wadah pengembangan profesi terhadap guru secara berkelanjutan.

Dalam hal ini peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diharapkan dapat mensukseskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut.

Sebagai gambaran sementara tentang keadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan guru pendidikan agama Islam di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut; jumlah SMK Negeri dan Swasta yang ada di Kota Banjarmasin ada 18 (delapan belas) buah yang terdiri dari: 5 (lima) buah SMK yang berstatus negeri dan 13 (tiga belas) buah SMK yang berstatus swasta. Dengan jumlah guru pendidikan agama Islam yang berstatus pegawai negeri berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan yang masih honorer dan guru tetap yayasan berjumlah 30 (tiga puluh) orang, jadi jumlah seluruhnya adalah 47 (empat puluh tujuh) orang. Sedangkan guru yang sudah bersertifikasi ada 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari guru bersertifikasi yang berstatus pegawai negeri ada 14 (empat belas) orang dan yang non pegawai negeri 3

¹⁷ Direktorat PAI Pada Sekolah, Dirjen Pendis Depag RI, *Pedoman Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam SMA/SMK*, (Jakarta: 2008), h. iii.

(tiga) orang.

Agar dapat lebih jelas maka dapat dilihat pada tabel berikut ini, tentang data Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta beserta nama-nama guru pendidikan agama Islam yang ada di kota Banjarmasin.

TABEL 1.1. DATA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SE-KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA SEKOLAH	STATU S	ALAMAT
1	2	3	4
1	SMKN 1	Negeri	Jl. Mulawarman No.45 B.Masin
2	SMKN 2	Negeri	Jl. Brigjen Hasan Basri B.Masin
3	SMKN 3	Negeri	Jl. Pramuka Komp Smenda Bjm
4	SMKN 4	Negeri	Jl. Brigjen Hasan Basri B.Masin
5	SMKN 5	Negeri	Jl. Letjen Soetoyo S Banjarmasin
6	SMK Muhammadiyah 1	Swasta	Jl. S. Parman Banjarmasin
7	SMK Muhammadiyah 2	Swasta	Jl. Cempaka II, No. 10 Banjarmasin
8	SMK Muhammadiyah 3	Swasta	Jl. Mangga III Banjarmasin
9	SMK Swadaya	Swasta	Jl. Kacapiring VII Banjarmasin
10	SMK Syuhada Teknologi	Swasta	Jl. Brigjen Hasan Basri Ujung Bjm
11	SMK Bina Banua	Swasta	Jl. Pramuka Banjarmasin
12	SMK YPT	Swasta	Jl. Rawasari Ujung Banjarmasin
13	SMK Farmasi ISFI	Swasta	Jl. Flamboyan Kayu Tangi Bjm
14	SMK Unggulan Husada	Swasta	Jl. P. Hidayatullah Banjarmasin
15	SMK Farmasi Mandiri	Swasta	Jl. Veteran Banjarmasin
16	SMK Farmasi Al-Furqon	Swasta	Jl. Cemara Ujung Banjarmasin
17	SMK Arung Samudera	Swasta	Jl. S. Parman Banjarmasin
18	SMK NU	Swasta	Jl. Pekauman Banjarmasin

TABEL 1.2. NAMA-NAMA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK SE-KOTA BANJARMASIN

No	Nama Sekolah	Nama Guru PAI	Status Kepeg
1	2	3	4

1	SMKN 1	Drs. H. Ah. Syauqi Dra. Hj. NorHidayah Dra. Hj. Arsimah Ahmad Riadi, S.Pd.I	PNS PNS PNS Honoror
2	SMKN 2	Amrullah, S.Pd.I Zulkani, M.Pd.I Nordiansyah, S.Pd.I	Honoror Honoror Honoror
3	SMKN 3	Drs. H. Muryadi, MM Drs. Rizqon, M.Pd.I Dra. Hj. Nurul Mughis Khairullah, S.H.I Abdullah Hayat, S.Pd.I	PNS PNS PNS Honoror Honoror
4	SMKN 4	Dra. Mariatul Qibtiah Marawiah, BA Marzuki, S.Pd.I	PNS PNS Honoror
5	SMKN 5	Drs. Bahruny, DP, M.Pd.I Dra. Ainun Syamsiah Erlina Erawati, S.Ag H. Sa'diansyah, S.Ag Abdul Hakim, S.Pd.I Raudah, S.Pd.I Syahrul Purnama, S.Pd.I Samsu Dhuha, S.Pd.I Fitriyah, S.Pd.I Rabiatul A, S.Pd.I Syahrawi, S.Pd.I Khairun Nisa, S.Pd.I	PNS PNS PNS PNS Honoror Honoror Honoror Honoror Honoror Honoror Honoror Honoror Honoror
6	SMK Muhammadiyah 1	Dra. Hj. Rusdiana Drs. H. Mahlan Darkasi	PNS PNS
7	SMK Muhammadiyah 2	Muhammad Qurtobi Fastamik Lima Y, S.Ag	PNS GTY
8	SMK Muhammadiyah 3	Salidah, S.Pd.I Lathifatus S, S.Pd.I Lutfiah, S.Pd.I Abdurrahman, S.H.I	GTY GTY GTY GTY
9	SMK Swadaya	Dra. Hj. Rabiatul A	PNS
10	SMK Syuhada Teknologi	Drs. H. Lamsi Hamdanah, BA	GTY PNS
11	SMK Bina Banua	Norhasanah, S.Ag Ahmad Zuhdi, S.Pd.I	GTY GTY
12	SMK YPT	Fadli, S.Pd.I	Honoror
13	SMK Farmasi ISFI	Hadiawati Rahmi, S.Ag	GTY
14	SMK Unggulan Husada	Dra. Saniah	GTY
15	SMK Farmasi Mandiri	Ahmad Fauzi	Honoror
16	SMK Farmasi Al-Furqon	Makmun, M.Pd.I	GTY

17	SMK Arung Samudera	Kasmuji D, M.Pd.I	Honorar
18	SMK NU	Arlina Shalihah, M.Pd	Honorar

Dalam meningkatkan profesionalisme guru, lebih khusus pada guru pendidikan agama Islam, maka dibuatlah suatu wadah atau forum guru pendidikan agama Islam yang disebut dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMK di Kota Banjarmasin mulai terbentuk pada tahun 2007 yang mana aktivitasnya hanya pada kegiatan- kegiatan rutin saja, tidak memiliki AD-ART dan program kerja yang jelas, baik program tahunan ataupun program semester. Sedangkan kegiatan terlaksana jika ada keperluan yang mendesak seperti membuat RPP, PROTA, PROSAM, dan pembuatan soal ujian, itupun hanya dihadiri oleh beberapa orang guru PAI saja. Hal tersebut perlu dimaklumi karena: (1) MGMP PAI SMK mulanya bergabung dengan MGMP PAI SMA Kota Banjarmasin, (2) Belum adanya sosialisasi yang optimal tentang keberadaan MGMP PAI SMK, dari pihak-pihak yang berwenang.

Namun setelah dibentuk kepengurusan MGMP untuk masa bakti 2007-2008, maka kepengurusan yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari Kepala Dinas Kota Banjarmasin No. 425.I/165/-DM/Dipendidik/2007, tanggal 22 November 2007, merupakan tolak awal untuk memulai kegiatan MGMP secara formal, walaupun kegiatan-kegiatan

yang dilakukan berkisar pada penyusunan program tahunan, semesteran, silabus, RPP, pembuatan soal Ujian Akhir Sekolah dan pemecahan masalah pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan-kegiatan seperti ini tetap berjalan sampai pada kepengurusan masa bakti 2009-2010. Sedangkan pendanaan kegiatan dari sekolah masing-masing dengan sistem iuran dan bantuan dana dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Pada tahun 2010 akhir, tepatnya tanggal 23 Desember 2010 terbitlah SK Bersama kepengurusan MGMP PAI yang baru No.421/277-DM/Dipendidik/2010 yang ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan kepala Kemenag Kota Banjarmasin. Dengan kepengurusan baru ini kemudian diadakan beberapa terobosan baru dalam mengembangkan dan meningkatkan kegiatan MGMP PAI, dengan cara : (1) Membuat AD-ART MGMP PAI SMK. (2) Membuat Visi dan Misi. (3) Mengirim beberapa GPAI dalam mengikuti pelatihan dan workshop. (4) Membuat beberapa proposal untuk meminta dana ke Instansi pemerintah seperti Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kemenag Kota Banjarmasin, LPMP Kalimantan Selatan, Kemenag Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Direktorat PAIS Pusat. Dan Alhamdulillah dengan proposal yang dikirim diberi tanggapan positif yaitu diberi bantuan sehingga dapat melaksanakan beberapa kegiatan MGMP seperti; (1) Workshop Penilaian Kinerja Guru selama 3 hari, (2) Pengembangan bahan ajar, (3) Pengembangan model-model pembelajaran, (4) Membuat media pembelajaran.

Pada tahun anggaran 2012, MGMP PAI SMK kota Banjarmasin menerima lagi dana dari Direktorat PAIS Kementerian Agama Pusat. Sehingga dengan dana tersebut dapat melaksanakan pelatihan bagi guru PAI selama 3 hari dengan materi; (1) Pembelajaran PAI berbasis ICT, (2) Sosialisasi kurikulum PAI 2013, (3) Pembuatan Penelitian Tindakan Kelas, (4) Pembuatan soal UASBN tahun 2013.

Dengan adanya beberapa kali kegiatan tersebut, maka peran MGMP PAI dapat dirasakan keberadaannya, lebih khusus dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sesuai dengan visi MGMP PAI SMK Kota Banjarmasin, yaitu: profesional dalam mengajar dan uswatun hasanah dalam pergaulan serta sensitif terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Perkembangan misi dari MGMP PAI SMK banyak diarahkan kepada: (1) Menyusun perangkat pembelajaran dan bahan ajar PAI se-Kota Banjarmasin, (2) Mengembangkan model-model pembelajaran yang baik. (3) Menyajikan pembelajaran PAI dengan IT, (4) Mengevaluasi hasil pembelajaran, (5) Mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru PAI, (6) Sebagai wadah atau tempat bertukar pikiran tentang masalah yang ada di sekolah atau di kelas.

Adapun kepengurusan MGMP PAI SMK Kota Banjarmasin, sementara ini menurut AD-ART adalah terdiri dari; (a) Ketua dan wakil ketua, (b) Sekretaris dan wakil sekretaris, (c) Bendahara dan wakil bendahara. (d) Bidang-bidang: yaitu; (1) Bidang program, (2) Bidang organisasi, (3) Bidang

sarana, (4) Bidang humas. Dan Anggota-anggota MGMP PAI yang terdiri dari guru PAI yang berstatus PNS ataupun yang berstatus honorer.

Pengurus MGMP PAI SMK mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu; (1) Harus mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, (2) Wajib membuat dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan anggaran pendapatan dan belanja MGMP PAI, (3) Melakukan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertulis, (4) Membuat dan melaporkan tentang kegiatan MGMP PAI kepada kantor kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan kantor kepala Kemenag Kota Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: ***PERAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMK DI KOTA BANJARMASIN.***

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian difokuskan pada Peranan MGMP Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Banjarmasin dan dirumuskan sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana profesionalisme guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin ?

2. Apa saja kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin ?
3. Bagaimana Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui profesionalisme guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan mengembangkan ilmu pendidikan mengenai peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin
- b. Informasi ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga yang berkompeten untuk meningkatkan profesionalisme guru pada umumnya dan terlebih khusus bagi guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat dari segi praktis operasional sebagai berikut:

- a. Bagi kepala sekolah: sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di sekolahnya masing-masing.
- b. Bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI): sebagai bahan ilmu pengetahuan tambahan dalam meningkatkan profesionalisme di sekolah masing-masing.
- c. Bagi Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; sebagai bahan masukan untuk peningkatan program dan strategi pembinaan kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) pendidikan agama Islam dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin.

- d. Bagi Pengawas pendidikan agama Islam sebagai bahan masukan dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin.
- e. Bagi Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam persoalan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud judul dan ruang lingkup penelitian ini, maka perlu ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu kekuatan yang dimiliki oleh kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk mengambil suatu keputusan pada organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) SMK terutama dalam membuat program kerja setiap tahunnya, dan melaksanakan program tersebut sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan kepada GPAI dapat memberikan informasi dan motivasi yang dapat meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta sebagai wadah

konsultasi jika terdapat masalah dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sampai kepada proses pembelajaran, dan juga ikut membantu Kasi PAIS Kemenag Kota Banjarmasin yang berhubungan dengan GPAI seperti; pendataan GPAI SMK setiap tahun.

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang dimaksudkan di sini adalah kumpulan guru-guru yang berprofesi sama sebagai guru pendidikan agama Islam yang menjadikan MGMP sebagai wadah fasilitator, motivator dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk pengembangan wawasan, kinerja, karir, dan prestasi yang terdiri dari guru-guru yang berstatus pegawai negeri dan non pegawai negeri / honorer yang menjadi pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta yang ada di kota Banjarmasin.
3. Profesionalisme yang dimaksud di sini adalah suatu sikap terhadap seorang guru agama Islam yang memiliki *skill* atau mempunyai kemampuan dalam (a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, (c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan mengembangkan diri.
4. Guru pendidikan agama Islam adalah pendidik mata pelajaran agama Islam yang sudah memiliki sertifikat pendidik (bersertifikasi) dengan tugas

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Dari definisi operasional di atas dapat diketahui maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Banjarmasin dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) seperti: membuat program kerja MGMP PAI setiap tahunnya, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti workshop kurikulum, pelatihan model-model pembelajaran, media pembelajaran berbasis ICT, kegiatan ekstrakurikuler PAI dan pembuatan soal-soal UASBN. Dan di samping itu pula membantu Kasi PAIS Kemenag Kota Banjarmasin dalam pendataan GPAI. Sedangkan kepada GPAI adalah dapat memberikan informasi dan motivasi dalam proses pembelajaran, seperti: (a) Merencanakan sistem pembelajaran diantaranya; merumuskan tujuan, memilih materi yang akan diajarkan, menggunakan metode, menggunakan sumber belajar yang ada, dan menggunakan media pembelajaran, (b) Melaksanakan sistem pembelajaran, seperti: memilih bentuk pembelajaran yang tepat, menyajikan urutan

pembelajaran yang tepat, (c) Mengevaluasi sistem pembelajaran, seperti: memilih dan menyusun jenis evaluasi, melaksanakan evaluasi, mengadministrasikan hasil evaluasi, (d) Mengembangkan sistem pembelajaran, seperti: mengoptimalkan potensi peserta didik, meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri, dan mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengungkap tentang Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam adalah :

1. Ulfah, Mahasiswa S2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2007 dengan judul *Aktivitas Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dalam meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dalam meningkatkan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhinya dalam meningkatkan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Subjek Penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang mengikuti Kelompok Kerja Guru Tahun Ajaran 2006/2007 yang berjumlah 15 orang, sedangkan objek

penelitian ini adalah Aktivitas Kelompok Kerja Guru PAI dalam meningkatkan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, angket, wawancara, dan documenter. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing, koding, tabulating dan interpretasi data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya dari jawaban responden, dari hasil nilai mengenai aktivitas Kelompok Kerja Guru PAI dalam meningkatkan profesionalisme guru sekolah Dasar Negeri dan ditunjang oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya juga memiliki nilai tinggi. Ini berjalan aktif dan sudah sesuai dengan dengan program Kelompok Kerja Guru PAI untuk meningkatkan profesionalisme guru.

2. M. Sirajuddin Arifin, Mahasiswa S2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009 dengan judul tesis *Profesionalisme Guru Mata Pelajaran Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kabupaten Barito Kuala (Studi Manajemen Sumber Daya Manusia)*.

Tujuan Penelitian untuk memperoleh gambaran tentang manajemen pengembangan kemampuan profesionalisme guru mata pelajaran Agama Islam yang telah dilaksanakan oleh Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Barito Kuala.

Proses (a) Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi langsung keobjek

penelitian. (b) Subjek penelitian adalah Kepala Madrasah dan Guru Mata Pelajaran Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kabupaten Barito Kuala dengan populasi 6 (enam) bulan, yaitu 30 orang Guru Mata Pelajaran Agama Islam. Sampel yang ditetapkan sebanyak 25 orang guru yang dianggap sudah memenuhi dan mewakili untuk diadakan penelitian.

Hasil Penelitian (a) Terdapat hubungan yang positif antara kesempatan Guru Mata Pelajaran Agama Islam menempuh Pendidikan lanjutan, dengan manajemen pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di MTsN Kabupaten Barito Kuala. (b) Terdapat hubungan yang positif dan bermakna antara variabel kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka diklat pra jabatan, diklat jabatan guru dan penataran dengan manajemen pengembangan sumber daya manusia (SDM) di MTsN Kabupaten Barito Kuala.

3. Zulkipli, Mahasiswa S2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009, dengan judul tesis; *Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau*.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini seluruh guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau tahun pelajaran 2008/2009 dan objek penelitian ini adalah profesionalisme Madrasah Aliyah Negeri 1 Rantau yang terdiri dari pemahaman guru dan implementasi empat

kompetensi dasar, kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Dalam pengumpulan data digunakan teknik sebagai berikut; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian semua data yang terkumpul diproses melalui pemeriksaan, pengklasifikasian, dan penyusunan, dan pembuatan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pemahaman guru MAN 1 Rantau tentang guru profesional adalah sudah sesuai dengan teori dan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, yaitu; memiliki kualifikasi akademik SI pendidikan, sehat jasmani dan rohani, menguasai empat kompetensi dasar (kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional), dan lulus uji sertifikasi; kedua, implementasi pemahaman guru menunjukkan mereka memiliki dan menguasai empat kompetensi dasar .

4. Bahrundy DP, Mahasiswa S2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2010 dengan judul tesis; *Eksistensi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam Pada SMA Di Kota Banjarmasin (Analisis SWOT Dalam Konteks Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam)*. Permasalahan Tesis ini adalah; Eksistensi MGMP PAI Pada SMA Kota Banjarmasin dalam konteks pengembangan kompetensi Guru PAI (Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan); fungsi dan tujuan, tugas dan tanggung jawab, bentuk kegiatan, serta perangkat organisasi MGMP PAI SMA Kota Banjarmasin.

Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah diskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini para Guru PAI, Pengurus dan anggota MGMP PAI SMA Kota Banjarmasin serta beberapa pejabat yang terkait dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Sumber dan alat pengumpul data meliputi; responden (GPAI), informan (pihak terkait), dan dokumen MGMP PAI SMA Kota Banjarmasin. Alat pengumpul data adalah angket, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data yaitu, penentuan katagorisasi bobot persentase dari frekuensi responden, ditindaklanjuti analisis, SWOT faktor internal MGMP itu sendiri.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa, secara persentasi kumulatif dari 87 item kegiatan, hanya 21 item (24,13%) kegiatan yang berjalan, dan 66 item (75,87%) kegiatan yang belum dilaksanakan, ini tentu berdampak pada pengembangan kompetensi GPAI SMA di Kota Banjarmasin itu sendiri. *Kekuatannya* meliputi kuantitas dan kualitas GPAI, wilayah kerja, sarana transportasi, informasi dan komunikasi, semangat ukhuwah, jenis kegiatan yang dimiliki GPAI / MGMP PAI SMA Kota Banjarmasin. *Kelemahannya* dalam hal; kurang lengkapnya perangkat organisasi dan kurang optimalnya fungsi MGMP tersebut, lemahnya kompetensi pengurus, kurang proaktifnya mengakses komunikasi dan informasi secara eksternal, tidak efektifnya pengelolaan waktu, tidak meratanya pembinaan karier GPAI / anggota MGMP, tidak adanya sarana, fasilitas serta anggaran khusus untuk peningkatan kegiatan MGMP PAI SMA di Kota Banjarmasin

tersebut.

5. Hajimah, Mahasiswi S2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2012, dengan judul tesis; *Implementasi Lesson Study Berbasis MGMP PAI Oleh Guru SMPN di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan.*

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi *Lesson Study* berbasis MGMP PAI dalam mengatasi kesulitan siswa SMPN di Kabupaten Balangan, yaitu diagnose kejenuhan dan ketidakpahaman siswa terhadap pelajaran. Dan untuk mengetahui implementasi *Lesson Study* berbasis MGMP PAI oleh guru SMPN di Kabupaten Balangan, yang terdiri dari *plan, do* dan *see*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi, yang digali dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan implementasi *Lesson Study* berbasis MGMP PAI dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, yaitu diagnose kejenuhan dan ketidakpahaman siswa terhadap pelajaran. Dan data implementasi *Lesson Study* berbasis MGMP PAI oleh guru SMPN di Kabupaten Balangan yang terdiri dari *plan, do* dan *see*. Subjek penelitian adalah guru PAI yang tergabung dalam MGMP PAI SMPN Kabupaten Balangan.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data dan display data untuk selanjutnya dilakukan analisis data.

Penemuan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Lesson Study* berbasis MGMP PAI dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa

berjalan sebagaimana mestinya, *plan* dibahas bersama-sama, *do* berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, kendala yang ditemukan antara lain; (a) penggunaan waktu yang kurang efektif dan efisien (b) guru kurang menguasai dan kurang terampil menggunakan model pembelajaran yang bervariasi (c) guru kurang mampu menggunakan ICT (d) media pembelajaran masih kurang (e) sarana dan prasarana belum memadai. Pada tahap *see* ditemukan bahwa, ketidakpahaman siswa terhadap pelajaran berawal dari kejenuhan, sehingga mereka tidak memperhatikan pembelajaran, rendahnya nilai post test, tidak berani menyampaikan pertanyaan dan tidak mampu menjawab pertanyaan secara lisan.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini berjudul “Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada SMK Di Kota Banjarmasin ini memuat enam bab, yaitu ;

Bab I, Pendahuluan, mengemukakan tentang gambaran (a) latar belakang masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) definisi operasional, (f) penelitian terdahulu, (g) sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teoritis, bab ini berupa kajian pustaka dalam kajian pustaka ini penulis mengemukakan tinjauan kepustakaan tentang; Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam.

(A) Dasar hukum MGMP (B) Tujuan MGMP (C) MGMP PAI sebagai Tempat Pembinaan (D) Organisasi MGMP PAI SMK (E) Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) (1) Pengertian Profesionalisme, (2) Ciri-ciri dan Prinsip guru Profesional (3) Permendiknas RI No. 16 Thn 2007.

Bab III, Metode Penelitian yaitu membahas tentang: (a) Jenis dan pendekatan penelitian, (b) Lokasi subjek dan objek penelitian, (c) Data, jenis dan sumber data, (d) Teknik pengumpulan data, (e) Teknik pengolahan data dan analisis data, (f) Pengecekan dan keabsahan data.

Bab IV, Paparan Data Penelitian, berisi tentang: (a) Gambaran umum MGMP PAI SMK, (b) Penyajian Data Penelitian.

Bab V, Pembahasan data penelitian, berisi tentang: (a) Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMK di Kota Banjarmasin, (b) Bentuk kegiatan MGMP PAI pada SMK di Kota Banjarmasin, (c) Peran MGMP PAI pada SMK di Kota Banjarmasin.

Bab VI, Penutup berisi tentang: (a) Simpulan, (b) Saran-saran.